

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kabupaten Pringsewu

1. Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi $104^{\circ}42'$ - $105^{\circ}8'$ Bujur Timur dan antara $5^{\circ}8'$ - $6^{\circ}8'$ Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pringsewu secara administrasi adalah.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km^2 , yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada Tanggal 3 April 2009 oleh Menteri

Dalam Negeri. Secara administrasi berdasarkan undang-undang pembentukan wilayah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdiri dari delapan wilayah kecamatan.

Sesuai perda Kabupaten Pringsewu nomor 12 tahun 2012 mengenai pemekaran wilayah, kecamatan di Kabupaten Pringsewu bertambah menjadi sebanyak sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, dan Kecamatan Pagelaran Utara. Berdasarkan sembilan kecamatan tersebut terdapat sebanyak tujuh kelurahan dengan jumlah 124 pekon atau desa secara keseluruhan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2012, sebanyak 370.157 jiwa yang terdiri dari laki-laki 189.954 jiwa dan perempuan 180.203 jiwa.

2. Kondisi Topografi

2.1 Kemiringan Lahan

Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gading Rejo dan Sukoharjo. Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih.

Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.

2.2 Ketinggian Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100–200 meter dpl, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 Ha atau sebesar 64,88% dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100–200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran, sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter dpl dengan porsi luasan terkecil atau sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya.

3. Gambaran Umum Usaha Pertanian dan Potensi Pertanian di Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Pringsewu sebanyak 54.677 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak dua usaha dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak dua usaha dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Pagelaran, Gadingrejo, dan Sukoharjo merupakan tiga kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing-masing 11.051 rumah tangga, 9.616 rumah tangga, dan 7.012 rumah tangga. Kecamatan Banyumas merupakan wilayah yang paling

sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 3.974 rumah tangga.

Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di Kabupaten Pringsewu untuk perusahaan sebanyak dua unit dan lainnya dua unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum berlokasi di Kecamatan Pringsewu yaitu sebanyak satu perusahaan dan di Kecamatan Gadingrejo yaitu sebanyak satu perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian terdapat di Kecamatan Pardasuka, yaitu sebanyak dua unit.

Struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu didominasi oleh sektor pertanian dengan komoditas yang dominan adalah padi sawah dan padi ladang, padi organik, jagung dan juga komoditas sayur mayur serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan juga kacang hijau. Total luas areal pertanian untuk padi organik di Kabupaten Pringsewu adalah 193 Ha dengan produksi rata-rata sekitar 770 ton/tahun. Sentra padi organik terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Gadingrejo, yang sebagian besar dikembangkan dengan menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati sehingga memiliki cita rasa dan harga jual lebih tinggi sekitar 30-40% dibandingkan dengan padi pada umumnya. Potensi ini dapat dikembangkan dengan adanya lahan yang tersedia dan SDM petani SLPHT yang ada, serta terbukanya peluang pengembangan industri penggilingan beras.

Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya. Komoditas tanaman palawija ini, menjadi komoditas yang cukup handal yang pemasarannya tidak saja di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, tetapi telah merambah keluar Provinsi Lampung, seperti Jakarta dan Palembang.

4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu

Total luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah seluas 62.510 Ha, dengan penggunaan lahan yang beraneka ragam. Penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi enam bagian yaitu, lahan non pertanian, lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan, lahan hutan, dan lainnya yang rinciannya dapat di lihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu.

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)					
		Non Pertanian	Sawah	Lahan Kering	Perkebunan	Hutan	Lainnya
1	Pardasuka	359	2.484	1.041	1.292	3.900	398
2	Ambarawa	633	1.390	1.044	-	-	32
3	Pagelaran	1.130	1.384	3.198	4.878	6.540	146
4	Pringsewu	1.428	2.192	1.372	183	46	107
5	Gadingrejo	2.127	2.556	2.138	1.654	-	96
6	Sukoharjo	2.145	1.020	1.446	2.589	-	94
7	Banyumas	608	320	1.483	1.392	148	35
8	Adiluwih	1.118	850	5.505	-	-	9
Jumlah		9.548	12.196	17.227	11.988	10.634	917

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2013.

Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah lahan kering atau tegalan yaitu seluas 17.227 hektar. Luas lahan yang digunakan untuk lahan kering atau tegalan 31,95% berada di Kecamatan Adiluwih, sedangkan sisanya tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Seluas 12.196 hektar lahan di Kabupaten Pringsewu digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 11.988 hektar, hutan seluas 10.634 hektar dan non pertanian seluas 9.548 hektar.

B. Kecamatan Gadingrejo

1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan yang terletak di bagian paling timur Kabupaten Pringsewu, berjarak \pm 15 km dari ibukota kabupaten. Terletak pada 104° - 105° Bujur Timur dan 05° Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 5.276 ha yang terdiri dari 23 pekon dengan jumlah penduduk sebanyak 73.964 jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 37.733 jiwa dan perempuan sebanyak 36.729 jiwa. Keadaan tanah di kecamatan ini berupa daratan, pegunungan, bukit, sawah, sungai dan danau serta rawa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Sukoharjo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Way Lima
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedongtataan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu

2. Kondisi Topografi dan Tanah

Kecamatan Gadingrejo mempunyai kawasan yang berada pada ketinggian < 400 meter dpl (diatas permukaan laut), sedangkan untuk kawasan perkotaan Gadingrejo berada pada ketinggian 200 meter dpl. Bentuk topografi Kecamatan Gadingrejo berdasarkan kemiringan lereng lahannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yang bervariasi yaitu mulai dari kelas lereng 0, 13%, dan 25%. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi dapat diketahui wilayah yang terjal terdapat di bagian Selatan yaitu Pekon Wates, sedangkan wilayah yang mempunyai kondisi lahan yang cukup datar umumnya tersebar di bagian tengah wilayah kecamatan.

Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 3 (tiga) jenis tanah yaitu: 1) gleisol distrik; 2) kambisol distrik; 3) podsolik kandik. Kawasan ini dilalui 3 (tiga) aliran sungai, yaitu Sungai Way Bulok Karto, Way Tebu dan Way Semah. Sungai-sungai tersebut digunakan oleh warga untuk irigasi dan pemandian hewan ternak.

3. Kondisi Penduduk, Lahan, dan Mata Pencaharian

Penduduk di Kecamatan Gadingrejo mayoritas beragama Islam dengan jumlah 77.221 orang, beragama Kristen sebanyak 244 orang, beragama Khatolik sebanyak 234 orang, beragama Hindu sebanyak 660 orang, dan beragama Budha sebanyak 21 orang yang tersebar di 23 pekon. Sebaran

luas lahan Kecamatan Gadingrejo berdasarkan jumlah pekon tersaji pada

Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Luas Kecamatan Gadingrejo Menurut Pekon.

No	Nama Pekon	Luas Wilayah (Ha)
1	Parerejo	381
2	Blitarrejo	374
3	Bulokarto	250
4	Panjerejo	323
5	Wates	194
6	Tambahrejo	251
7	Wonodadi	370
8	Gadingrejo	402
9	Tegalsari	350
10	Tulung Agung	625
11	Bulurejo	239
12	Yogyakarta	127
13	Kediri	200
14	Mataram	238
15	Wonosari	266
16	Klaten	101
17	Wates Timur	172
18	Wates Selatan	84
19	Gadingrejo Timur	115
20	Gadingrejo Utara	240
21	Gadingrejo Barat	103
22	Wonodadi Utara	134
23	Yogyakarta Selatan	117
Jumlah		5.658

Sumber: Profil Kecamatan Gadingrejo, 2014.

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui luas Kecamatan Gadingrejo menurut pekon. Penelitian ini dilakukan di Pekon Bulurejo, Pekon Bulurejo mempunyai luas wilayah seluas 239.2 Ha. Sebagian besar luas wilayah tersebut digunakan untuk lahan pertanian padi sawah. Sarana dan prasarana di Pekon Bulurejo meliputi sarana pendidikan yaitu 2

(dua) SD Negeri dan 1 (satu) SMK Swasta. Sarana tempat ibadah yaitu 2 (dua) masjid dan 5 (lima) mushola.

C. Kecamatan Sukoharjo

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini selain di Kecamatan Gadingrejo, juga dilakukan pada Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo mempunyai luas wilayah sebesar 7.294 Ha. Pekon Waringin Sari Barat adalah salah satu pekon yang ada di wilayah Kecamatan Sukoharjo dengan luas wilayah sebesar 625 Ha. Pekon Waringin Sari Barat berada di sebelah utara ibukota Kecamatan Sukoharjo dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Bandung Baru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Keputran
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Waringin Sari Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Siliwangi

2. Kondisi Topografi dan Tanah

Pekon Waringin Sari Barat berada pada ketinggian 96 meter dpl (diatas permukaan laut). Pekon Waringin Sari Barat terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun dan 19 rukun tetangga (RT). Jenis tanah di daerah penelitian ini pada umumnya yaitu jenis tanah podsolik merah kekuningan.

3. Kondisi Penduduk, Lahan, dan Mata Pencaharian

Pekon Waringin Sari Barat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.930 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.984 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.946 jiwa, serta terdiri dari 1.451 kepala keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk di Pekon Waringin Sari Barat sebagian besar sebagai petani dan buruh tani, berikut tersaji pada Tabel 13, rincian jumlah penduduk Pekon Waringin Sari Barat berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Pekon Waringin Sari Barat Berdasarkan Mata Pencaharian.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Presentase (%)
1	TNI/Polri	3	0.21
2	PNS	69	4.75
3	Swasta	75	5.16
4	Pedagang	223	15.4
5	Buruh Tukang	74	5.1
6	Petani Pemilik	759	52.3
7	Buruh Tani	197	13.57
8	Pensiunan	15	1.03
9	Jasa	36	2.48
Jumlah		1451	100.00

Sumber: Profil Kecamatan Sukoharjo, 2014.

D. Gambaran Umum Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo.

1. Bank Pelaksana dan Plafon KKP-E

Bank pelaksana KKP-E meliputi 22 bank yaitu 9 (sembilan) bank umum: Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, CIMB Niaga, Agroniaga, BCA, BII, dan Artha Graha serta 13 (tiga belas) Bank Pembangunan Daerah (BPD)

yaitu: BPD Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua, Riau dan Nusa Tenggara Barat.

Plafon KKP-E secara nasional sebesar Rp 8,806 trilyun yang meliputi untuk sub sektor tanaman pangan: Rp 2,730 trilyun, hortikultura: Rp 725,330 milyar, perkebunan (tebu) Rp 2,993 trilyun, peternakan : Rp 2,046 trilyun dan pengadaan pangan: Rp 310,830 milyar.

2. Suku Bunga, Sumber Dana dan Risiko Kredit

Besarnya tingkat bunga bank, tingkat bunga kepada peserta KKP-E dan subsidi bunga kredit oleh pemerintah dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Tingkat Bunga Bank, Tingkat Bunga Peserta KKP-E dan Subsidi Bunga.

No	Uraian	Bunga Bank	Bunga Kepada Peserta	Subsidi Bunga
1	KKP-E Tebu	10,5%	5%	5,5%
2	KKP-E Lainnya	11,5%	6%	5,5%

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Cabang Pringsewu, 2013.

Program KKP-E ini menggunakan sumber dana yang berasal dari masing-masing bank pelaksana dan risiko dari program KKP-E ini sepenuhnya ditanggung oleh bank pelaksana. Pemerintah berperan antara lain menyediakan subsidi suku bunga dan *risk sharing* untuk komoditas padi, jagung dan kedelai. Keputusan akhir kredit ada pada bank mengingat risiko kredit sepenuhnya ditanggung bank.

3. Persyaratan dan Kewajiban Kelompok Tani

Kelompok tani atau calon nasabah yang akan penerima pinjaman KKP-E, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerjasama dengan mitra usaha. Apabila kelompok tani bekerjasama dengan Mitra Usaha agar membuat kesepakatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra
- b. Kelompok tani telah terdaftar pada Balai Penyuluhan Pertanian atau Dinas Teknis terkait setempat
- c. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E
- d. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara
- e. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota

Kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka pengajuan pinjamannya akan disetujui oleh pihak bank dan sah sebagai kelompok tani penerima KKP-E yang memiliki kewajiban sebagai berikut.

- a. Menyediakan formulir RDKK
- b. Menyeleksi petani anggotanya calon penerima KKP-E
- c. Menyusun RDKK bersama anggotanya dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat/penyuluh pertanian
- d. Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri, RDKK yang sudah disahkan langsung diajukan kredit kepada bank pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok

- e. Bagi kelompok tani yang mengajukan langsung kredit langsung ke bank, kelompok tani menandatangani akad kredit dengan bank
- f. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok
- g. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok
- i. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada bank pelaksana.

4. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian KKP-E

Prosedur awal pengajuan permohonan KKP-E sama untuk semua kegiatan usaha, baik dilaksanakan oleh petani/peternak/pekebun secara individu, kelompok tani/ secara mandiri dan yang bekerjasama dengan mitra usaha yaitu petani/peternak/ pekebun, kelompok tani/koperasi yang membutuhkan pembiayaan KKP-E melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKP-E, dengan memperhatikan kebutuhan indikatif yang telah ditetapkan.

Prosedur pencairan dan pengembalian KKP-E sebagai berikut :

- a. Permohonan KKP-E yang kegiatan usahanya mandiri yang dilaksanakan petani/ peternak/pekebun secara individu atau kelompok tani dapat langsung diajukan kepada bank pelaksana dengan dilampiri RKU yang telah ditandatangani petani/peternak/pekebun/kelompok tani dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat/penyuluh pertanian.

- b. Permohonan kredit diteliti oleh bank pelaksana dan apabila memenuhi syarat, maka petani/peternak/pekebun/kelompok tani melakukan akad kredit dengan bank pelaksana.
- c. Bank pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/koperasi untuk diteruskan kepada anggotanya.
- d. Kelompok tani/koperasi meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/anggota kelompok tani.
- e. Petani/kelompok tani harus mengembalikan kewajiban KKP-E kepada bank pelaksana sesuai dengan jadwal.